

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN - BAGIAN A. IKATAN AKUNTAN INDONESIA.*
- IAI (2022). *PSAK 109: Instrument Keuangan.*
- Karouw, S. F., Sabijono, H., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Manajemen Pragmatis*, 2(2), 84–97. <https://doi.org/10.58784/ramp.120>
- Kieso, D. E. . W. W. (2020). Intermediate Accounting IFRS Edition. In *John Wiley & Sons, Inc.* (Vol. 5, Issue 3).
- ojk. (2023). *Perusahaan Pembiayaan.*
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). POJK Nomor 35 /Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. *Otoritas Jasa Keuangan*, 2. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penyelenggaraan-Usaha-Perusahaan-Pembiayaan/pojk-35-2018.pdf>
- OJK. (2024). *PELAKU LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA.* 13(Ii), 166–173.
- Romney, M. B., Steinbart, P. J., Summers, S. L., & Wood, D. A. (2021). *Accounting Information Systems* (15th ed.).
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2022). *Weygandt\_Kimmel\_Kieso - Financial Accounting with International Financial Reporting Standards 4\_e-Wiley* (2018).

## **Jurnal**

- Achmad, A. Z. (2024). *ANALISIS DAMPAK PENERAPAN OUTSOURCING TERHADAP KINERJA KINERJA ORGANISASI ( Studi Kasus Di Taman Lalu Lintas Bandung )*. 4(September), 449–456.
- Alviatri, R. (2024). Analisis Perhitungan PPh 21 PT FIFGROUP Yogyakarta berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi (2024)*, 2 (10): 509–525, 1192, 509–522.
- Arief, D. R., Mardiani, I., Zuhdi, A., Pahala, I., & Wahono, P. (2024). *Studi Komparasi : Perbandingan Penghitungan Pph 21 Sebelum Dan*. 13(3), 725–733.
- Fitriya. (2024). *PPh 21 Terbaru 2024*.
- Miraningtyas, A. S. A., Priyandani, S., & Yudowati. (2019). Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi & Akuntansi*, 3(3), 76–85. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss1.pp76-85>
- Munthe, E. S., Lidia, R., Harahap, A. H., & Vientiany, D. (2024). Upaya Dalam Merencanakan Penerapan Pajak PPh 21 Sebagai Langkah Pengefesiensian Pajaks Penghasilan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 62–68. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/index>
- Trisnawati, A., & Sulistyowati, E. (2024). *Analisis Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) Perusahaan Penyedia Jasa Ekspedisi Dan Logistik*. 6(2), 324–329.
- Wibawa, K., Kudhori, A., & Akbar, D. I. (2024). Analisa Perhitungan Kurang/Lebih Bayar PPh Pasal 21 (Berdasarkan PP No.58 Tahun 2023. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(2), 358–369. <https://doi.org/10.47233/jebbs.v4i2.1838>
- Wulandari, P., & Epi, Y. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi pada Kas Kecil PT. Kallista Alam Kantor Medan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.47709/jebma.v1i1.972>

### ***Website***

- Databoks. (2023). *Ditopang Penerimaan Pajak, Pendapatan Negara Capai Rp647,2 Triliun pada Maret 2023*.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/18/ditopang-penerimaan-pajak-pendapatan-negara-capai-rp6472-triliun-pada-maret-2023#:~:text>
- Djp. (2024). *Fungsi Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Kementerian Keuangan. (2024). *SPT Masa PPh Unifikasi*.
- Kontan.co.id. (2020). *Begini kontribusi multifinance terhadap perekonomian Indonesia menurut OJK*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/begini-kontribusi-multifinance-terhadap-perekonomian-indonesia-menurut-ojk>
- Mekari Klik Pajak. (2024). *Info Tarif Pajak Penghasilan PPh Pasal 4 Ayat 2 Sewa dan Lainnya*. <https://klikpajak.id/blog/pph-pasal-4-ayat-2/>
- Online Pajak. (2024). *Mengenal Apa Itu e-Faktur & Layanan e-Faktur di OnlinePajak*.
- PER-2/PJ/2024, Pub. L. No. 2, Direktorat Jenderal Pajak (2024).  
<https://www.pbtaxand.com/assets/uploads/files/1707222912-PER2PJ2024.pdf?typeKey=public>
- PER-24/PJ/2021. (2021). *Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi*.
- PMK No. 12/PMK.03/2017, Pub. L. No. 12, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017).
- PMK No 168. (2023). *Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi*.

UU No 16 Tahun 2009. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*, 1–11.

UU No 36. (2008). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN*. 61–64.

UU No. 11 Tahun 2020, ddtc.co.id (2020).

UU HPP No. 7 Tahun 2021, Pub. L. No. 7 (2021).

